

Judul : Perlu Prioritas untuk Daerah Bencana Sumatera
Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Perlu Prioritas untuk Daerah Bencana Sumatera

JAKARTA, KOMPAS — Bencana di Sumatera merenggut hak ribuan anak untuk memperoleh pendidikan setelah infrastruktur sekolah rusak dan kondisi sosial ekonomi warga terpuruk. Karena itu, penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak terdampak mesti menjadi prioritas pemerintah.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati menyatakan, dukungan negara melalui kebijakan afirmatif di bidang pendidikan bagi anak-anak dan mahasiswa yang terdampak bencana di Sumatera amat krusial.

Pemerintah bisa mengalokasikan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bantuan uang kuliah tunggal (UKT), serta skema beasiswa lain selama masa pemulihan hingga beberapa waktu ke depan.

Pemulihan pascabencana tidak hanya membangun kembali fisik dan infrastruktur, tetapi juga memastikan mutu sumber daya manusia terjaga. Para murid dan mahasiswa korban bencana saat ini terdampak kondisi sosial dan ekonomi keluarganya sehingga berisiko putus sekolah dan berhenti kuliah.

"Dalam kondisi pascabencana, keluarga sering kali kehilangan mata pencarian dan mengalami tekanan ekonomi berat. Negara harus memastikan anak-anak tetap bersekolah dan mahasiswa dapat melanjutkan studinya," kata Kurniasih, dalam keterangan pers, Rabu (7/1/2026).

Untuk itu, Komisi X DPR mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Mene-

ngah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikristek) mendata secara akurat dan responsif peserta didik dan mahasiswa yang terdampak bencana.

Adapun mekanisme penyaluran bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang terdampak bencana alam di Sumatera perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan agar tidak menghambat hak pendidikan mereka.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga filantropi juga dapat berkolaborasi menyediakan beasiswa berkelanjutan bagi pelajar dan mahasiswa terdampak bencana.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar dukungan pendidikan tidak bersifat sementara, tetapi mampu menopang proses pemulihan jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan, pemerintah terus berupaya memulihkan pendidikan di daerah terdampak bencana secara menyeluruh. Sebab, pemulihan pendidikan tidak hanya soal membuka kembali sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak bisa belajar dengan penuh semangat dan optimisme.

Data per 30 Desember 2025, Kemendikdasmen mencatat ada 4.149 satuan pendidikan yang terdampak bencana. Dengan rincian 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat.

Mu'ti memaparkan, pihaknya akan mengalokasikan anggaran revitalisasi secara berkelanjutan bagi satuan pendidikan yang masih dalam proses pemulihan, termasuk melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1), Mu'ti menyerahkan secara simbolis sekitar 2.000 paket peralatan sekolah berupa tas, alat tulis, dan seragam kepada murid serta sekolah terdampak bencana. Pemerintah juga memberikan voucher uang tunai untuk membantu pembersihan sisa material banjir di sekolah-sekolah di Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan meliputi 27.000 paket peralatan sekolah, 147 tenda, 160 ruang kelas darurat, 212.000 buku bacaan, dukungan psikososial Rp 700 juta, serta dana operasional lebih dari Rp 25 miliar. Selain itu, Kemendikdasmen juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan, yakni Rp 15,7 miliar untuk 7.861 orang di Aceh, Rp 5,5 miliar untuk 2.795 orang di Sumatera Barat, dan Rp 11,5 miliar untuk 5.783 orang di Sumatera Utara.

Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas, Pelindungan, dan Pengendalian Direktorat Guru Pendidikan Dasar Meliyanti menyatakan, peran guru dan tenaga kependidikan penting untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan berpihak pada kebutuhan peserta didik, termasuk menghadirkan rasa aman dan dukungan psikososial. (TIO)